BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a) Sejarah Malang[24]

Kota malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami

[24] http://www.malangkota.go.id/mlg_halaman.php?id=1606071, diakses tanggal 5 Juni 2013

perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

Sekilas Sejarah Pemerintahan

1. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.
2. Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota
3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas
4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen
5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.
6. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja
7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang

8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
11. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.

Gelar yang Disandang Kota Malang:

1. **Paris of Java**

   Karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk dan kotanya yang bersih, bagaikan kota Paris nya Jawa Timur.

2. **Kota Pesiar**

   Kondisi alam yang elok menawan, bersih, sejuk, tenang dan fasilitas wisata yang memadai merupakan ciri-ciri sebuah kota tempat berlibur

3. **Kota Peristirahatan**

   Suasana Kota yang damai sangat sesuai untuk beristirahan, terutama bagi orang dari luar kota Malang, baik sebagai turis maupun dalam rangka mengunjungi keluarga/famili.

4. **Kota Pendidikan**

   Situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk belajar/menempuh pendidikan.

5. **Kota Militer**

   Terpilih sebagai kota Kesatrian. Di Kota Malang ini didirikan tempat pelatihan militer, asrama dan mess perwira disekitar lapangan Rampal., dan pada jaman Jepang dibangun lapangan terbang Sundeng di kawasan Perumnas sekarang.

6. **Kota Sejarah**

   Sebagai kota yang menyimpan misteri embrio tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Singosari, Kediri, Mojopahit, Demak dan Mataram. Di Kota Malang juga terukir awal kemerdekaan Republik bahkan Kota Malang tercatat masuk nominasi akan dijadikan Ibukota Negara Republik Indonesia.

7. **Kota Bunga**

   Cita-cita yang merebak dihati setiap warga kota senantiasa menyemarakkan sudut kota dan tiap jengkal tanah warga dengan warna warni bunga.

b) Penduduk dan Sosiologi

Jumlah

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar ***820.243 jiwa*** yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

Komposisi

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina).

Agama

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

Seni Budaya

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi.

Bahasa

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut 'boso walikan' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya: seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi

Pendatang

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Malang

a) Visi dan Misi[25]

Visi

Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan pemerataan akses pendidikan untuk mewujudkan insan yang cerdas, berakhlak, profesional dan berbudaya.

[25] http://diknas.malangkota.go.id/ diakses tanggal 13 Juni 2013

Misi

1. Mewujudkan kualitas, kuantitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
2. Mewujudkan managemen dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

b) Tugas Pokok dan Fungsi[26]

Tugas Pokok

Dinas Pendidikan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan.

Fungsi Dinas Pendidikan Kota Malang

Dinas Pendidikan Kota Malang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pendidikan;
3. sosialisasi dan pelaksanaan kurikulum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal;
5. pelaksanaan pembinaan kelembagaan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal;
6. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan non formal;
7. pengawasan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;

[26] *ibid*

8. pembinaan dan usulan penempatan tenaga fungsional kependidikan;
9. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pendidikan;
10. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya;
11. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
12. pelaksanaan penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan non formal;
13. pelaksanaan fasilitasi akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi kompetensi tenaga fungsional kependidikan yang profesional;
14. sosialisasi dan pelaksanaan uji kompetensi siswa, warga belajar dan penilaian hasil belajar secara nasional;
15. pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian;
16. pelaksanaan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
17. pelaksanaan dan pengawasan kerjasama di bidang pendidikan;
18. pelaksanaan dan pembinaan olah raga dan kesenian;
19. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
20. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
21. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
22. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;

23. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
24. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
25. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
26. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
27. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bentuk Pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 Yang Dilaksanakan Oleh Diknas Kota Malang

Dinas Pendidikan Kota Malang merupakan ujung tombak dari pendidikan yang berkualitas. Kota Malang sebagai Kota Pendidikan sudah barang tentu harus mempunyai kualitas baku mutu pendidikan yang bagus. Menurut Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang[27] ada beberapa indikator yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang yang juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional terkait dengan capaian baku mutu pendidikan bagi sekolah-sekolah dan ini harus dipenuhi oleh sekolah agar sekolah mencapai baku mutu pendidikan yang bagus, indikator-indikator itu antara lain:

a. standar isi;

[27] Hasil wawancara dengan Ka.Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendikan Kota Malang tanggal 4 Juni 2013

b. standar proses;

c. standar kompetensi lulusan;

d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

e. standar sarana dan prasarana;

f. standar pengelolaan;

g. standar pembiayaan;dan

h. standar penilaian pendidikan.

Delapan indikator ini juga sudah dipahami oleh sekolah-sekolah yang ada di Kota Malang hal ini dibenarkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang[28] yang mengatakan bahwa petunjuk dari Dinas Pendidikan untuk mencapai baku mutu pendidikan sekolah merupakan arahan dari Pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh Sekolah dan sudah ditauangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang nantinya diharapkan semua sekolah di semua jenjang Pendidikan menjadi Sekolah Berstandar Nasional. Menurut Salah seorang Guru di SMA Negeri 9 Malang[29] semua sekolah harus melaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan mengupayakan terlaksananya kurikulum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan akreditasi sekolah, mengupayakan sertifikasi kompetensi tenaga professional kependidikan, sekolah harus mengupayakan sarana dan prasarana penunjang kependidikan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar dan standar

[28] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[29] Hasil wawancara dengan Guru SMA Negeri 9 Malang, tanggal 5 Juni 2013

kelulusan di dalam internal sekolah, mengupayakan fasilits satuan pendidikan bertaraf internasional.

Sementara itu menurut Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah) SMP Negeri 18 Malang[30] ada tujuh hal yang menjadi turunan dari delapan indikator tersebut yang menjadi prioritas di dalam mencapai baku mutu pendidikan yaitu:

1. Profesionalisme tenaga pendidik
2. Peningkatan pemahaman kurikulum dan penerapannya
3. Sarana dan Prasarana sekolah yang tersedia
4. Penilaian dan evaluasi pembelajaran
5. Daya tarik dan keberhasilan belajar
6. Pengembangan budaya
7. Pendayagunaan lingkungan

Lebih lanjut dikatakan oleh Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang bahwa MGMPS merupakan wadah untuk peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan pemahaman kurikulum dan penerapannya.

Sementara itu menurut untuk mencapai indikator pengembangan budaya menurut Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas[31] adalah melalui pendidikan karakter yaitu dengan merealisasikan dalam membudayakan 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) dan adanya kantin kejujuran

[30] Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[31] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, tanggal 4 Juni 2013.

disekolah, untuk Pendayagunaan Lingkungan di sekolah-sekolah dicanangkan budaya *Green clean* (Kebersihan Lingkungan) ini untuk membiasakan peserta didik mampu dan memahami kelestarian lingkungan dan dapat mendayagunakan serta melestarikan lingkungan.

Hal tersebut diatas dibenarkan juga oleh Kepala Sekolah SD Negeri Blimbing 3 Malang[32] dan beliau juga menambahkan bahwa Untuk Peningkatan sarana dan prasarana sekolah juga merupakan keharusan bagi sekolah baik secara swadaya maupun dengan bantuan Pemerintah, ditambahkannya pula Standar kelulusan (SKL) dengan nilai yang bagus dan ketuntasan belajar minimal adalah merupakan penerapan dari penilaian dan evaluasi belajar termasuk di dalamnya inovasi dan kreatifitas sekolah dalam melakukan proses pembelajaran. Kesemuanya itu menurut Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang harus dituangkan di dalam EDS (Evaluasi Diri Sekolah), EDS merupakan bentuk evaluasi dan juga pembuatan-pembuatan program sekolah sebagai penerjemahan delapan indikator tersebut. Sehingga kedelapan indikator peningkatan baku mutu yang merupakan satu rangkaian tersebut dapat terselenggara dengan baik. Menurutnya semua sekolah sudah memahami kedelapan indikator tersebut, sehingga tidak ada keengganan bahkan merupakan kewajiban untuk melaksanakan indikator tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sekolah SD Kauman 1 Malang, beliau mengatakan bahwa semua sekolah berkewajiban untuk melaksanakan delapan indikator capaian baku mutu pendidikan dan yang terpenting di SD Kauman 1 sendiri meningkatkan mutu

[32] Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, tanggal 4 Juni 2013

pendidikan sendiri adalah tugas utama sekolah dikarenakan SD Kauman 1 merupakan SD Unggulan.

Menurut Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang Bidang Humas[33] delapan indikator tersebut sudah sesuai dengan Visi SMP Negeri 1 Malang yaitu "Unggul berlandaskan Budi pekerti yang luhur dan berwawasan lingkungan", sehingga SMP Negeri 1 Malang sudah pasti akan menjalankan kedelapan indicator itu karena dengan melaksanakan ke delapan indikator capaian baku mutu SMP Negeri 1 Malang sudah melaksanakan Visi sekolah itu sendiri.

Berbicara mengenai Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 dalam hal ini ada dua ayat yang harus dianalisa. Di dalam pasal 36 ayat (1) Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 ada beberapa unsur yang berkaitan dengan Pencapaian baku mutu pendidikan yang harus dilakukan pembahasan berdasarkan hasil penelitian ini, unsur-unsur yang terdapat di dalam di dalam 36 ayat (1) Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan harus melaksanakan pembinaan dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan.
b. Dinas Pendidikan harus melaksanakan pengembangan dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan.
c. Dinas Pendidikan harus melaksanakan pembimbingan dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan.
d. Dinas Pendidikan harus melaksanakan pengendalian dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan.

[33] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, tanggal 4 Juni 2013

e. Dinas Pendidikan harus melaksanakan evaluasi kinerja dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan.

Kelima unsur ini harus berjalan simultan untuk memperoleh hasil yang bagus dalam rangka pencapaian baku mutu pendidikan.

Dari hasil penelitian untuk unsur pembinaan menurut Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang Dinas Pendidikan Kota Malang[34] melakukan pembinaan secara intensif baik terhadap lingkungan sekolah secara keseluruhan maupun terhadap tenaga pendidik. Pembinaan yang dilakukan berkenaan dengan pencapaian baku mutu pendidikan adalah berupa workshop managemen sekolah, Diklat tentang Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Pernyataan ini dibenarkan oleh Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang Bidang Humas[35] bahwa tiap tahunnya Dinas Pendidikan selalu mengadakan Pembinaan untuk pencapaian baku mutu pendidikan berupa pelatihan-pelatihan maupun workshop baik yang berkaitan dengan managemen sekolah maupun tentang peningkatan kompetensi Guru dan tenaga kependidikan.

Ditambahkan oleh Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang[36] selain pembinaan tersebut diatas Dinas Pendidikan juga melakukan Pembinaan Terhadap seni budaya di sekolahnya yaitu dengan mengirimkan Pembina Seni dan Budaya untuk melatih anak didiknya berkesenian seperti Tari

[34] Hasil wawancara dengan Ka.Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendikan Kota Malang tanggal 4 Juni 2013

[35] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, tanggal 4 Juni 2013

[36] Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang, tanggal 4 Juni 2013

Topeng. Perlu diketahui bahwa SMP Negeri 18 Malang selalu ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Malang untuk mengisi acara-acara seni yang selalu ada di Kota Malang misalnya Acara 1000 topeng, PPSI Jatim, dll.

Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Blimbing 3[37] banyak pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terutama bagi sekolah-sekolah unggulan dari mulsi workshop seperti tersebut diatas maupun pembinaan langsung ke sekolah-sekolah dan semua pembinaan masih sesuai dengan jalur yang digariskan untuk mendapatkan capaian baku mutu pendidikan. SD Negeri blimbing 3 adalah salah satu sekolah unggulan untuk tingkat Sekolah Dasar. Sementara itu menurut Kepala Sekolah SDN Kauman 1 Malang[38] banyak sekali program-program pembinaan sekolah untuk menuju ke arah professional, inovatif, prestasi, dan lain-lain. Di SMA Negeri 9 Malang Dinas Pendidikan Kota Malang melakukan pembinaan dalam bidang keolahragaan, dukungan terhadap bidang keolahragaan di SMA Negeri 9 Malang dilakukan secara maksimal oleh Dinas Pendidikan, disamping itu Dinas Pendidikan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan serta seminar-seminar sebagai upaya peningkatan baku mutu pendidikan yang diikuti oleh SMA Negeri 9 Malang.[39]

Dalam hal Dinas Pendidikan harus melaksanakan pengembangan dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan menurut Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang Dinas Pendidikan Kota Malang[40]mengatakan

[37] Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, Tanggal 4 Juni 2013

[38] Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Kauman 1 Malang, Tanggal 4 Juni 2013

[39] Hasil wawancara dengan Guru SMA Negeri 9 Malang, tanggal 5 Juni 2013

[40] Hasil wawancara dengan Ka.Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendikan Kota Malang Kota Malang, tanggal 4 Juni 2013

bahwa Dinas Pendidikan Kota Malang melakukan pengembangan-pengembangan dalam hal peningkatan kompetensi guru, dan melaksanakan lomba-lomba antar sekolah yang dapat memacu standar baku mutu pendidikan serta melaksanakan seleksi Kepala Sekolah dan Guru berprestasi yang kriterianya adalah kreatifitas dan inovatif Kepala Sekolah dan Guru sehingga bisa memacu baku mutu sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Blimbing 3 Malang[41] pihak sekolah juga melakukan pengembangan yang bisa memacu baku mutu sekolah antara lain:

1. Pengembangan dalam inovasi Sistem Kegiatan Belajar mengajar dan
2. Meningkatkan standar kelulusan (SKL) yaitu dengan peningkatan jumlah nilai dalam ujian.

Sedangkan menurut Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang[42] pihak sekolah melakukan pengembangan di internal sekolah terutama dengan mengadakan pelatihan-pelatihan guru dan mengikutsertakan guru-guru dalam MGPS, mengadakan seminar-seminar dan pengajar tamu, serta varian ekstrakurikuler yang mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan baku mutu pendidikan kesemuanya itu didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Malang.

Jika di SMP Negeri 1[43] upaya pengembangan dilakukan dari hari ke hari untuk meningkatkan baku mutu sekolah dengan cara sebagai berikut:

1. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan,
2. meningkatkan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik, serta

---

[41] Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, Tanggal 4 Juni 2013

[42] Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[43] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, tanggal 4 Juni 2013

3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pendidikan dengan cara membuka kotak saran sebagai bahan masukan dari masyarakat tentang baku mutu sekolah dan layanan yang harus diperbaiki.

Kesemua pengembangan itu didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Lain lagi upaya pengembangan di SMA Negeri 1 Malang, SMA negeri 1 Malang berupaya untuk dapat mencapai delapan standar baku mutu pendidikan dengan melakukan seminar-seminar yang didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Malang antara lain seminar pengembangan kurikulum dan seminar Teknologi Informasi (*learning management system*), seminar media pembelajaran, disamping itu sekolah berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana dengan bantuan Komite Sekolah.[44] Di SD Negeri Kauman 1 pengembangan standar baku mutu di internal sekolah adalah dengan menggandeng kerjasama dengan instansi terkait utamanya kerjasama dengan Universitas Negeri Malang (UM) terkait dengan profesionalisme guru.[45]

Untuk unsur pembimbingan dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan, menurut Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang Dinas Pendidikan Kota Malang bahwasannya Dinas Pendidikan Kota Malang berupaya melakukan pembimbingan melalui pelatihan-pelatihan guru dan Kepala Sekolah serta penyusunan Program-program kerja sekolah dan juga bimbingan kepada sekolah ketika dilaksanakannya lomba-lomba sekolah, dan sebagainya.[46]

---

[44] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[45] Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[46] Hasil wawancara dengan Ka.Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendikan Kota Malang tanggal 4 Juni 2013

Selama ini Dinas Pendidikan Kota Malang telah memberikan bimbingan dalam upaya pencapaian baku mutu pendidikan, bimbingan-bimbingan yang pernah dilakukan menurut Kepala SD Negeri Kauman 1 Malang[47] semisal Bimbingan Teknis dan beberapa bimbingan untuk Guru dan tenaga administrasi sekolah. Bimbingan-bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah demikian diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang.[48]

Dinas Pendidikan Kota Malang telah melakukan bimbingan dengan baik, SMA Negeri 9 Malang. Bimbingan itu dilakukan oleh Pengawas Sekolah untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.[49] Dinas Pendidikan harus melaksanakan pengendalian dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan, pengendalian itu dilakukan oleh pengawas-pengawas sekolah sebagai kepanjangtanganan dari Dinas Pendidikan Kota Malang yang mempunyai tugas memberikan pengawasan dan pembinaan kepada sekolah-sekolah untuk dapat mencapai standar baku mutu pendidikan, hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang Dinas Pendidikan Kota Malang. Pengendalian juga dilakukan melalui Penilaian Baku Mutu Sekolah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS).[50]

---

[47] Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[48] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang, Tanggal 4 Juni 2013

[49] Hasil wawancara dengan Guru SMA Negeri 9 Malang, tanggal 5 Juni 2013

[50] Hasil wawancara dengan Ka.Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendikan Kota Malang tanggal 4 Juni 2013

Menurut Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang[51] pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan mengirimkan pengawas Sekolah, yang kemudian dari hasil supervisi tersebut Sekolah diminta untuk membuat laporan supervisi manajemen sekolah dan kegiatan akademik, hal itu juga dibenarkan Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang[52] menurut beliau bahwa ada monitoring dari pengawas terhadap pencapaian baku mutu pendidikan. Sebagai wakil dari Dinas Pendidikan dan Pemerintah, Pengawas Sekolah selalu melakukan monitoring tentang pencapaian baku mutu sekolah demikian diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang.[53] Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang,[54] Dinas Pendidikan selalu mendampingi dan memberikan arahan-arahan yang benar dalam melakukan monitoring. Kesemuanya itu dibenarkan oleh salah seorang Guru SMA Negeri 9 Malang bahwa monitoring dan evaluasi selalu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang minimal sekali dalam setahun.[55]

Dalam hal Dinas Pendidikan Kota Malang harus melaksanakan evaluasi kinerja dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan, menurut Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang Evaluasi selalu dilakukan dengan

---

[51] Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[52] Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang

[53] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[54] Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[55] Hasil wawancara dengan Guru SMA Negeri 9 Malang, tanggal 5 Juni 2013

tidak membeda-bedakan apakah itu sekolah unggulan atau bukan, evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan biasanya dilakukan setahun sekali baik itu melalui pengawas sekolah maupun oleh Unsur Dinas Pendidikan Kota Malang yang lainnya. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang[56] Evaluasi secara berkala tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang saja, bahkan juga dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Evaluasi pencapaian baku mutu pendidikan dilakukan melalui Pengawas dan dilakukan secara berkala, begitu menurut Koordinator MGMPS Kota Malang[57]. Menurut Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang biasanya evauasi itu dilakukan di akhir tahun pelajaran.[58]

Menurut Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas[59] menambahkan bahwa Evaluasi di sekolah-sekolah yang dilakukan selain oleh Dinas Pendidikan Kota Malang biasanya juga dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan biasanya dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Di internal sekolah juga melaksanakan evaluasi tentang standar baku mutu, di SMA Negeri 1 biasanya evaluasi dilakukan setiap dua kali dalam setahun melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS).[60] Jika di SD Negeri Kauman 1 Malang

---

[56] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[57] Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang, , tanggal 4 Juni 2013

[58] Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[59] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, tanggal 4 Juni 2013

[60] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

biasanya evaluasi sekolah mengarah pada akreditasi sekolah yang ada setiap 4 taun sekali dan pencapaian hasil peningkatan sekolah setiap tahunnya.[61]

Di SMP Negeri 18 Malang evaluasi dilakukan setidaknya 1 semester satu kali yang tujuannya membahas kemajuan sekolah sesuai dengan standar baku mutu yang ada.[62]SMP Negeri 1 Malang melakukan evaluasi sekali dalam satu tahun.[63] Pada SD Negeri Blimbing 3 Malang[64] ada 2 (dua) macam evaluasi yang dilakukan yaitu:

1. Penilaian Hasil belajar siswa yang dilakukan 2 kali dalam setahun
2. Standar kelulusan (SKL) yang dilakukan setahun sekali.

Tentu saja muara dari Pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 adalah tingkat kelulusan yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dengan standar nilai kelulusan yang bagus, karena pencapaian Baku Mutu Pendidikan dikatakan ada peningkatan bisa diukur dengan tigkat kelulusan dari tahun ke tahun tersebut. Pencapaian peningkatan Baku mutu harus mulai diukur dari mulai berlakunya Perda tersebut yaitu dimulai tahun ajaran 2010/2011. Untuk tingkat kelulusan SD di Kota Malang pada tahun ajaran 2010/2011 dengan jumlah peserta UN 11.327 mencapai kelulusan 100% tetapi peringkat hasil UN Rata-rata untuk Kota Malang berada di urutan Nomor 14 se-Jawa timur, dan Nilai tertinggi UN kota malang untuk Tahun tersebut berada di urutan Nomor 3. Di tahun ajaran 2011/2012 Kota Malang meraih peringkat nomor

[61] Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[62] Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[63] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, tanggal 4 Juni 2013

[64] Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, tanggal 4 Juni 2013

1 untuk nilai UN SD tertinggi se-Jawa Timur dan peringkat hasil UN SD rata-rata berada pada urutan 9 se-Jawa Timur, dengan jumlah peserta 11.345 peserta dengan jumlah peserta yang lulus sebesar 11.134 itu berarti tingkat kelulusan hanya 97.89%. Sementara itu di tahun ajaran 2012/2013 Kota Malang sampai penelitian ini ditulis belum mengetahui berada di urutan berapa untuk peringkat nilai rata-rata UN SD se Jawa Timur, namun untuk peringkat nilai UN tertinggi Kota Malang tidak berhasil meraih peringkat 10 besar, jumlah peserta UN untuk Tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 12.217 peserta dengan jumlah kelulusan 12.158 siswa atau sekitar 99,41%.

Sedangkan untuk hasil UN SMP untuk Tahun ajaran 2010/2011 dengan jumlah peserta UN 12.580 dengan jumlah siswa yang lulus 12.439 atau sekitar 98,59% peringkat Nilai UN rata-rata berada di urutan 37 dari 38 Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Untuk tahun ajaran 2011/2012 dengan jumlah peserta 11.613 jumlah kelulusan SMP mencapai 11.575 peserta itu berarti tingkat kelulusan mencapai 99,67% lebih baik dari tahun ajaran sebelumnya, namun peringkat nilai rata-rata hasil UN seJawa Timur, Kota Malang hanya mampu naik ke peringkat 35 itu berarti naik 3 peringkat dari tahun ajaran 2010-2011. Di Tahun ajaran 2012/2013 ini jumlah peserta UN SMP/MTs Kota Malang sebanyak 11.297 dengan jumlah kelulusan 11.258 atau sebesar 99.61% mengalami penurunan 0,06% dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, namun yang patut dibanggakan menurut Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang[65] ada satu siswa yang

[65]Hasil wawancara dengan Ka.Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendikan Kota Malang, tanggal 4 Juni 2013

memperoleh Nilai UN masuk peringkat 5 besar hasil UN di tingkatan Nasional yaitu Shofiya Qurrotu A`Yunin dari MTs Negeri 1 Malang.

Di tingkat SMA, untuk Tahun ajaran 2010/2011 dengan jumlah peserta UN 5.704 peserta yang tidak lulus UN hanya 3 peserta saja itu berarti 99,97% lulus UN. Untuk Tahun ajaran 2011/2012 Jumlah peserta UN di Kota Malang sebanyak 14.203 peserta, jumlah peserta yang tidak lulus sebanyak 22 siswa itu berarti angka kelulusan Kota Malang untuk tahun ajaran 2011/2012 mencapai 99,78% jumlah kelulusan itu menurun dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Sedangkan di Tahun ajaran 2012/2013 5.134 peserta UN Kota Malang, yang berhasil lulus berjumlah 5.115 itu berarti 99,81% peserta yang lulus dan ada peningkatan prosentase kelulusan dari tahun sebelumnya.

Tabel 1

Hasil UN Kota Malang Untuk Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA Tahun

Tahun Ajaran	Jenjang Pendidikan											
	SD				SMP				SMA			
	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Prosentase Kelulusan	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Prosentase Kelulusan	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Prosentase Kelulusan
2010/ 2011	11.327	11.327	0	100%	12.580	12.439	141	98,59%	5.704	5.701	3	99,97%
2011/ 2012	11.345	11.134	211	97.89%	11.613	11.575	38	99,67%	14.203	14.181	22	99,78%
2012/ 2013	12.217	12.158	59	99,41%	11.297	11.258	39	99.61%	5.134	5.115	19	99,81%

Ajaran 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

Sumber Data Sekunder: Dinas Pendidikan Kota Malang, diolah, 2013.

Pembahasan selanjutnya tentang pelaksanaan Pasal 36 ayat (2) Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 di dalam Pasal 36 ayat (2), Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 dikatakan bahwa bagi satuan pendidikan yang telah mencapai baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mengembangkan menjadi Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional. Namun pelaksanaan Pasal 36 ayat (2) ini menjadi terbentur dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam Amar putusan menyatakan bahwa

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini sebagai dasar hukum RSBI/SBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional/Sekolah Berstandar Internasional) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perlu diketahui bahwa Kota Malang memiliki RSBI mulai dari SD sampai dengan SMA sekolah-sekolah tersebut antara lain SDN Tlogowaru, SDN Kauman 1, SDN Tunjungsekar 1, SMPN 1, SMPN 3, dan SMPN 5. Sedangkan untuk SMA adalah SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, dan SMAN 8.[66]

Tabel 2

Daftar Sekolah RSBI Kota Malang

SD	SMP	SMA
1. SDN Tlogowaru 2. SDN Kauman 1 3. SDN Tunjungsekar 1	1. SMPN 1, 2. SMPN 3, 3. SMPN 5	1. SMAN 1, 2. SMAN 3, 3. SMAN 4, 4. SMAN 5, dan 5. SMAN 8

Sumber Data Sekunder: Dinas Pendidikan Kota Malang, diolah, 2013

Semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler, yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, yang diteken

[66] Hasil wawancara dengan Ka.Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendikan Kota Malang, tanggal 4 Juni 2013.

Mendikbud pada Rabu, 30 Januari 2013 kemarin, ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012, yang mengabulkan permohonan Koalisi Pendidikan ke MK. Putusan MK itu menghapus dasar hukum penyelenggaraan RSBI. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) dan tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sementara terkait pembiayaan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah eks RSBI. Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI. [67]

Pada surat edaran tersebut juga diatur pembagian tanggung jawab baik pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan SNP. Adapun pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetap bertanggung jawab membina sekolah eks RSBI. Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.[68]

---

[67] http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1015, diakses tanggal 8 Juni 2013
[68] *ibid*

Menurut Nuh[69] (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) sekolah eks-RSBI untuk sementara tidak memiliki status apa pun hingga tahun ajaran baru atau selama masa transisi. Sekolah eks-RSBI juga dilarang menggunakan papan nama, kop surat, dan stempel sekolah berlogo RSBI.

Berbagai tanggapan baik itu pro dan kontra mewarnai putusan MK tersebut diatas termasuk juga di Kota Malang, Dinas Pendidikan Kota Malang sendiri melalui Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang[70] mengatakan ketidaksetujuannya berkaitan dengan penghapusan RSBI, karena RSBI merupakan *brand image* bagi sekolah-sekolah untuk menjaring siswa-siswa berprestasi dan sebagai nilai tawar bahwa sekolah dapat *go international*. Setelah dihapuskannya RSBI, Dinas Pendidikan Kota Malang menginstruksikan kepada semua Kepala Sekolah RSBI untuk tetap menjaga mutu sekolah dengan pembiayaan yang minimal walaupun *Jer Basuki Mawa Bea* yang artinya untuk mendapatkan mtu pendidikan yang bagus butuh pembiayaaan.

Menurut Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, pihaknya tidak setuju dihapuskannya RSBI, karena RSBI masih diperlukan guna memacu siswa untuk dapat berprestasi secara Internasional, hanya saja penataannya yang perlu ditata kembali. Misalnya saja dengan melihat potensi dan motivasi dari daerah-daerah dan propinsi serta tetap mengakomodir siswa cerdas tetapi dari keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi. SMP Negeri 1

[69] http://www.suarapembaruan.com/home/sekolah-eks-rsbi-tak-otomatis-berstatus-ssn/30120, diakses tanggal 8 Juni 2013

[70] Hasil wawancara dengan Ka.Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendikan Kota Malang, tanggal 4 Juni 2013

Malang sebelumnya merupakan salah satu RSBI, setelah dihapuskannya RSBI, sekolah berbenah diri untuk kembali menjadi SSN (Sekolah Standar Nasional).[71]

Hal senada juga diungkapkan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang[72], beliau tidak setuju apabila RSBI dihapuskan karena ini merupakan ajang kompetisi dan supaya sekolah Non RSBI bisa mengejar mutu sekolah RSBI dan kemudian juga menjadi RSBI. Di SMA Negeri 1 Malang sendiri masih ada beberapa program yang dijalankan dari program-program RSBI terutama program-program yang mendukung kualitas Sekolah. Kalau menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang[73], bukan terletak pada persoalan setuju ataupun tidak setuju tentang dihapuskannya RSBI tapi ini adalah keputusan final dari Pemerintah Pusat sehingga sekolah tinggal menjalankan saja. Semenjak dihapuskannya RSBI SD Negeri Kauman 1 Malang lebih konsen untuk menjalankan peningkatan mutu sesuai dengan harapan sekolah.

Lain lagi pendapat yang setuju dengan penghapusan RSBI, seperti diungkapkan oleh Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang[74] beliau tidak setuju dengan RSBI, karena selama ini hanya labeling saja atau penamaan saja RSBI tapi kualitasnya jauh dari harapan, lebih baik Sekolah Standar Nasional tetapi kualitas siswa-siswinya yang *Go International*. Sementara itu menurut Koordinator

[71] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, tanggal 4 Juni 2013

[72] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[73] Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

[74] Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, tanggal 4 Juni 2013

MGMPS Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang[75] setuju dengan dihapuskannya RSBI karena menurutnya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dari keberadaan RSBI yaitu:

1. RSBI bersifat mendadak dan tidak memperhatikan kesiapan sekolah
2. Guru dan tenaga kependidikan belum mempersiapkan diri dengan penggunaan Bahasa Inggris, dikarenakan kemampuan Bahasa inggris guru yang masih kurang
3. Guru lebih banyak memikirkan cara berkomunikasi dan melupakan materi pelajaran yang merupakan inti pokok dari proses belajar mengajar
4. Mutu siswa menjadi berkurang karena dipaksakan untuk mempunyai prestasi yang bagus dan *Go International*
5. RSBI tidak dapat dijangkau semua kalangan karena biaya pendidikannya mahal dan memberatkan orang tua wali.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 Yang Dilaksanakan Oleh Diknas Kota Malang Dan Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut

Jika kita berbicara tentang hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang nomor 3 tahun 2009 harus memilah mana hambatan yang dialami oleh Dinas Pendidikan itu sendiri maupun hambatan yang dialami oleh internal sekolah itu sendiri, karena bagaimanapun sekolah sebagai ujung tombak dari kebijakan pasal 36 Perda Kota Malang nomor 3 tahun 2009 adalah

[75] Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang, tanggal 4 Juni 2013

pihak sekolah. Hambatan yang dialami oleh Dinas Pendidikan Kota Malang di dalam penerapan penilaian baku mutu Pendidikan adalah pada persoalan Sumber Daya Manusia yang ada di dalam sekolah, persoalan tersebut terletak pada diri masing-masing Guru, persoalan-persoalan tersebut sangatlah kompleks, persoalan itu mulai dari kreatifitas guru dalam cara mengajar, inovatif guru, kemampuan guru dalam menterjemahkan standar, dsb. Sehingga upaya yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kota Malang adalah uji kompetensi sekolah dan tenaga pendidik dan sertifikasi para tenaga pendidik, karena dengan hal itu diharapkan guru-guru semakin terpacu untuk mendapatkan baku mutu pendidikan yang bagus.

Sementara itu hambatan yang dialami sekolah untuk mencapai baku mutu pendidikan menurut Kepala SD Negeri Kauman 1 Malang[76] datang dari sarana dan pra sarana untuk mewujudkan yang terbaik dan juga Sumber Daya Manusia itu sendiri, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana yang ada bekerja sama dengan komite sekolah, dan kerja sama dengan Universitas Negeri Malang (UM) terkait dengan profesionalisme guru. Hambatan yang dialami SMP Negeri 1 Malang[77] adalah kuranganya pemahaman Orang tua siswa/wali murid tentang program-program kerja sekolah sehingga upaya yang ditempuh adalah selalu mengkomunikasikan program-program sekolah melalui pertemuan-pertemuan rutin dengan orangtua/wali murid satu kali tiap semester.

[76] Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013.

[77] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, tanggal 4 Juni 2013

Hambatan yang dirasakan oleh SMA Negeri 1 Malang[78] berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 ada beberapa hal yaitu:

Kebijakan Daerah yang kadang-kadang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada

1. Dalam mencapai 8 standar baku mutu pendidikan masih terdapat 20% Sumber Daya Manusia yang ada di internal sekolah belum memenuhi standar yang diharapkan, misalnya saja tidak mau merubah paradigm yang ada.
2. Kompetensi dari tenaga pendidikan belum memenuhi standar baku mutu.

Upayanya adalah dengan selalu memberikan pemahaman tentang standar baku mutu pendidikan terhadap 20% SDM yang belum paham, sampai mereka benar-benar paham dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sesuai dengan baku mutu pendidikan

Di SMP Negeri 18 Malang hambatan di dalam pelaksanakan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 ada beberapa hal, yaitu:

1. Adanya persepsi sekolah gratis, sehingga menyulitkan sekolah untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah
2. Program yang belum berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang saat ini bersifat insidental
3. Kurikulum yang sampai saat ini belum ajek sangat menyulitkan guru untuk mengaplikasikan dalam pengajaran.

[78] Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang, tanggal 4 Juni 2013

Upaya yang dilakukan adalah mengajak kerjasama komite sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dan berusaha mencari program-program yang bisa berkelanjutan dan dapat meningkatkan baku mutu pendidikan di sekolah.